

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PROVINSI DI SUMATERA

Istyana Tiara¹, Nelly Masnila², Anggeraini Oktarida³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

Email : diviistyani@gmail.com¹, nellymasnila@polsri.ac.id², anggeraini_oktarida@polsri.ac.id³

Abstrak

Kegiatan meneliti ini mempunyai tujuan supaya memahami adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penggunaan sampel dalam kegiatan meneliti ini menggunakan sampel jenuh yakni Provinsi di Sumatera yang menggunakan rasio efisiensi (dengan persentase <100%) selama tahun 2018-2022. Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan memberikan pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan

Abstract

This study aims to determine the effect of local revenue, Balancing Funds, Capital Expenditures, and Regional Government Size on financial performance. This research is a quantitative research. The sample used in this research activity uses a saturated sample, namely the Province in Sumatra which used an efficiency ratio (with a percentage <100%) during 2018-2022. The results of the research are that there is an influence of Regional Original Income, Balancing Funds, Capital Expenditures, and the size of the Regional Government on Financial Performance which has an influence on Financial Performance.

Keywords: *Regional Original Income, Capital Expenditures, Balancing Funds, Regional Government Size, Financial Performance*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2, tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang

Undang ini menegaskan bahwa setiap daerah telah diberi wewenang yang signifikan untuk mengelola urusan daerahnya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan daerah yang lebih mandiri dan otonom serta mencapai perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang pesat. tercapainya otonomi daerah akan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah, Peningkatan PAD akan meningkatkan sumber daya pemerintah daerah dan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk lebih mengembangkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah yang mempunyai sumber daya alam dan perkembangan industri yang melimpah mempunyai PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang sumber daya alam dan industrinya lebih sedikit. Suatu daerah dapat dikatakan daerah yang mandiri apabila daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membangun daerah, sebaliknya apabila transfer dana yang diberikan pemerintah pusat lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah, maka daerah tersebut merupakan daerah yang belum mandiri, Ketika daerah mandiri maka daerah tersebut tidak bergantung kepada dana dari pemerintah pusat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus *et al.*, (2021) dengan Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Hasilnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Resa *et al.*, (2023) dengan lebih memfokuskan pada Ukuran Pemerintah Daerah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: Pertama, Variabel penelitian menggunakan Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan, sedangkan penelitian ini menggunakan Variabel: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kinerja Keuangan. Kedua, Objek Penelitian. Penelitian sebelum nya

melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022. Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dari itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi di Sumatera”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pertama, pajak daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku dan diperoleh dari pungutan wajib atau kontribusi terutang yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pajak daerah ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang yang berlaku dan tidak diterima secara langsung. Pajak daerah ini juga tidak digunakan secara langsung. Kedua, retribusi daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari pembayaran atas jasa dalam izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan. Contoh hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan termasuk bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik negara (BUMN), dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, pendapatan tambahan dari daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang diterima oleh daerah dari sumber lain yang dimiliki oleh pemerintah

daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah yang berbeda. Ini diberikan oleh pemerintah.

Dana Perimbangan

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 19 Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan pada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut Budianto dan Alexander (2017:4), Dana Perimbangan adalah sumber pendanaan daerah yang dialokasikan oleh APBN untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuan otonomi daerah, terutama dalam hal meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk membangun otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan dana perimbangan. Saat ini dana perimbangan memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai kegiatannya.

Belanja Modal

Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari pengeluaran untuk membeli aset tetap, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud. Menurut Nordiawan (2006:46), belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, seperti infrastruktur, peralatan, dan harta tetap lainnya. Ada tiga cara untuk mendapatkan aset tetap tersebut: membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau membeli. Dalam akuntansi, ada perbedaan antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Investasi ini termasuk dalam definisi belanja modal.

Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, halaman 17a, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial diharapkan diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat di masa depan. Aset total pemerintah daerah dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah dan

meningkatkan kinerja keuangan mereka. Ini karena pemerintah dengan aset yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah dengan aset yang kecil. Aset ini dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan sumber daya yang dipelihara karena alasan serius.

Kinerja Keuangan

Fahmi (2012:2) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran dari keberhasilan perusahaan yang dapat digambarkan sebagai hasil dari berbagai tindakan yang telah diambil. Dengan kata lain, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan benar. Menurut Rudianto (2013:189), kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan selama periode waktu tertentu dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan atas suatu fenomena yang ada serta menggambarkan dengan jelas dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data realisasi APBD dan laporan keuangan pendapatan daerah yang memiliki kaitan dengan Kinerja Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah di Sumatera.

Menurut Sugiyono (2018), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini memanfaatkan seluruh populasi Pemerintah Provinsi Sumatera untuk tahun anggaran 2018–2022.

Menurut Sugiyono (2023) menyatakan bahwa Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu 5 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022, dan data yang terdiri atas 10 provinsi Se-Sumatera, sehingga merupakan pooled the data yaitu gabungan antara data time series (tahun 2018-2022: 5 tahun) dengan data 10 provinsi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasi oleh BPK. Data yang digunakan

merupakan data yang telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sehingga Laporan Keuangan dengan periode penelitian (5 Tahun) yaitu 2018-2022 sehingga dalam penelitian ini terdapat 250 Unit Observasi untuk diolah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan menggunakan analisis statistik dengan program *Eviews 12*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut merupakan hasil dari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Di Sumatera. Data penelitian menggunakan LKPD pada tahun 2018-2022 di 10 (sepuluh) Provinsi Di Sumatera dengan menggunakan analisis *software Eviews 12*.

Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran data secara deskriptif. Nilai-nilai umum dalam statistik deskriptif diantaranya ialah rata-rata (mean), simpangan baku, nilai minimal (minimum), nilai maksimal (maximum), dan jumlah (sum). Nilai ini bermanfaat memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang diteliti sehingga dapat menjelaskan karakteristik data yang ada dengan menjelaskan besaran nilai tersebut.

Statistik deskriptif menyajikan gambaran masing-masing variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah sedangkan variabel dependennya ialah Kinerja Keuangan. Berdasarkan data yang ada, diperoleh hasil statistik deskriptif. Hasil statistik deskriptif data LKPD Provinsi Di Sumatera yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	28.43699	28.81961	27.66454	30.18034	0.124808
Median	28.55876	28.78349	27.55855	30.03461	-0.067223
Maximum	29.61313	29.64835	29.39501	31.19334	6.224558
Minimum	27.25039	27.98697	26.47710	29.07901	-1.108663
Std. Dev.	0.633760	0.472677	0.798958	0.688763	1.092893

Sumber: Eviews 12, 2024

Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model data panel di bagi menjadi tiga pendekatan yaitu *common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect model* Untuk menginterpretasikan hasil analisis, ketiga pendekatan model harus dipilih salah satu yang paling tepat, dalam memilih model data panel tersebut, maka dilakukan pengujian yaitu *F Test (Chow Text)*, *Hausman Test*, dan *Langrangge Multiplier (LM) Test*.

a. F Test (Chow Test)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Pengambilan Keputusan atau tingkat signifikansi 5% (0,05) sebagai berikut:

-Jika nilai prob > maka model yang terbaik adalah Common Effect

-Jika nilai prob > maka model yang terbaik adalah Fixed Effect

Tabel 2. Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.205071	(9,36)	0.3221
Cross-section Chi-square	13.166951	9	0.1552

Sumber: Eviews 12, 2024

Maka dapat disimpulkan pada uji Chow Test penggunaan model yang terbaik adalah *Common Effect*.

b. Hausman Test

Hausman Test dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat tantara *Fixed Effect* dan *Random Effect* pengambilan keputusannya atau tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) sebagai berikut:

- Jika nilai Prob. > maka model yang terbaik adalah *Random Effect*.
- Jika nilai Prob. < maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect*.

Tabel 3. Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	7.355875	4	0.1182

Sumber: Eviews 12, 2024

Maka dapat disimpulkan pada Hausman Test model yang terbaik adalah *Random Effect Model*.

c. Lagrange Multiplier (LM)

LM-Test dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara *Common Effect* dan *Random Effect*.

- Jika LM hitung > *Chi Squared Table*, maka model yang terbaik adalah *Common Effect*.
- Jika LM hitung < *Chi Squared Table*, maka model yang terbaik adalah *Random Effect*.

Tabel 4. Lagrange Multiplier Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.000236 (0.3877)	0.185443 (0.2667)	0.185679 (0.1665)
Honda	0.015354 (0.4939)	0.430631 (0.3334)	0.315359 (0.3762)
King-Wu	0.015354 (0.4939)	0.430631 (0.3334)	0.366823 (0.3569)
Standardized Honda	1.024578 (0.1528)	0.965472 (0.1672)	-2.138052 (0.9837)
Standardized King-Wu	1.024578 (0.1528)	0.965472 (0.1672)	-1.945661 (0.9742)
Gourieroux, et al.	--	--	0.185679 (0.5611)

Sumber: Eviews 12, 2024

Berdasarkan uji LM, model yang terbaik adalah menggunakan *Common Effect Model*.

Penggunaan *Common Effect Model* terpilih 2 (Dua) kali pada F Test Chow Test dan Lagrange Multiplier Test, sedangkan *Random Effect Model* terpilih 1 (Satu) kali yaitu pada Hausman Test. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model (*Common Effect*

Model, Fixed Effect Model, Dan Random Effect Model), penggunaan model yang terbaik adalah *Common Effect Model* dalam menginterpretasikan regresi data panel penelitian.

Hasil Regresi Data Panel

Setelah melaksanakan tiga rangkaian pengujian yang terdiri dari Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *LM* untuk memilih manakah model regresi data panel yang terbaik dan cocok untuk digunakan dalam penelitian, maka didapatkanlah model *Random Effect* sebagai model yang terbaik untuk mengestimasi regresi data panel dalam penelitian yang akan dilakukan ini:

Tabel 5. Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.368172	10.09684	2.430245	0.5976
X1	-1.310524	0.616827	3.260591	0.0391
X2	0.640690	0.851711	0.729852	0.9258
X3	-0.415876	0.322815	2.011728	0.0142
X4	0.830494	0.490406	2.484761	0.0472

Sumber: *Eviews 12, 2024*

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Pengujiannya terdiri dari Uji Koefisien Determinasi (R²), Uji Signifikan Parsial (Uji t), dan Uji Signifikansi Simultan (Uji F).

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Tabel 6 menyajikan hasil uji koefisien determinasi (R²).

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.161059	Mean dependent var	0.124808
Adjusted R-squared	0.266486	S.D. dependent var	1.092893
S.E. of regression	1.044564	Akaike info criterion	3.019716
Sum squared resid	49.10015	Schwarz criterion	3.210919
Log likelihood	-70.49291	Hannan-Quinn criter.	3.092527
F-statistic	2.886705	Durbin-Watson stat	1.255284
Prob(F-statistic)	0.028912		

Sumber: *Eviews 12, 2024*

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independent berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk menentukan apakah secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat kemandirian. Berdasarkan uji parsial atau uji t yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa:

- Jika nilai t-hitung > t-tabel, artinya H0 diterima
- Jika nilai t-hitung < t-tabel, artinya H0 ditolak

Tabel 7. Uji Signifikansi Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.368172	10.09684	2.430245	0.5976
X1	-1.310524	0.616827	3.260591	0.0391
X2	0.640690	0.851711	0.729852	0.9258
X3	-0.415876	0.322815	2.011728	0.0142
X4	0.830494	0.490406	2.484761	0.0472

Sumber: Eviews 12, 2024

Uji Signifikansi Simultan (Uji Simultan F)

Pengujian hipotesis dengan distribusi F merupakan pengujian hipotesis dengan menggunakan distribusi F sebagai uji statistic. Tabel pengujiannya disebut table F. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan Ketentuan:

- Jika F hitung > F table atau p-value/signifikansi hitung <0.05, maka H0 diterima
- Jika F hitung < F table atau p-value/signifikansi hitung >0.05, maka H0 ditolak.

Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan (F)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.368172	10.09684	2.430245	0.5976
X1	-1.310524	0.616827	3.260591	0.0391
X2	0.640690	0.851711	0.729852	0.9258
X3	-0.415876	0.322815	2.011728	0.0142
X4	0.830494	0.490406	2.484761	0.0472
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.161059	Mean dependent var	0.124808	
Adjusted R-squared	0.266486	S.D. dependent var	1.092893	
S.E. of regression	1.044564	Akaike info criterion	3.019716	
Sum squared resid	49.10015	Schwarz criterion	3.210919	
Log likelihood	-70.49291	Hannan-Quinn criter.	3.092527	
F-statistic	2.886705	Durbin-Watson stat	1.255284	
Prob(F-statistic)	0.028912			

Sumber: Eviews 12, 2024

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi negatif sebesar -1.310524 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0391 lebih kecil dari nilai 0.05, dan t-hitung 3.260591 maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga dalam penelitian ini Ho diterima dan H1 diterima. Hasil uji R² pada penelitian ini adalah 0,0744 atau sebesar 74,4% nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan erat variabel independent terhadap variabel dependen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lathifa et. Al. (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.640690 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0255 lebih kecil dari nilai 0.05, dan t-hitung 0.729852 maka dapat disimpulkan variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga dalam penelitian ini Ho ditolak dan H2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lubis et al. (2022) Andjarwati et al., (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat Belanja Modal memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.415876 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0042 lebih kecil dari nilai 0.05, dan t-hitung 2.011728 maka dapat disimpulkan variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_3 diterima.

Hasil penelitian yang dilakukan Maulina et al (2021) dan Sari et al (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malau & Parapat (2020) dan Oktavia Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa faktor belanja modal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat Ukuran Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.830494 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0472 lebih kecil dari nilai 0.05, dan t-hitung 2.484761 maka dapat disimpulkan variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_4 diterima.

Hasil penelitian yang dilakukan Natariasari et al., (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti size merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara simultan, dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar 2.886705 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.028912 lebih kecil

dari nilai 0.05, maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan sehingga dalam penelitian ini H_0 diterima dan H_5 diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Di Sumatera Tahun 2018-2022 yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera.
2. Dana Perimbangan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera. Karena, semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat kemampuan finansial dan kemandirian yang rendah karena tingginya tingkat ketergantungan.
3. Belanja Modal berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera.
4. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera.
5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Kinerja Keuangan di Sumatera.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio lain seperti rasio kemandirian rasio evektifitas, rasio ekonomis untuk mengukur kinerja keuangan. Pemerintah daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sehingga, ketergantungan pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat bisa dikurangi. Objek penelitian dapat dikembangkan, dari yang sebelumnya hanya dalam batasan pulau menjadi setiap kota atau provinsi di Indonesia. Variabel independen lain yang diduga dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah dapat ditambahkan. Pengembangan objek dan variabel akan membuat hasil penelitian lebih relevan untuk lebih banyak objek dan dapat dijadikan salah satu sumber ilmiah bagi kota atau provinsi yang bersangkutan dalam mengevaluasi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki & Nano Prawoto. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). *Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. International Journal of Economic sand Finance Studies*, 13(1), 235–250.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2017). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Dipenogoro Journal Of Accounting*, 8(2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indonesia. *Journal of Management*, 12(2), 2385–2390.
- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 3(2), 332-337.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah.

- Natariasari, R., Yusrarlaini, Y., & Maiyora, G. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Studi Empiris Kabupaten/kota di Pulau Sumatera). *Riau University*, 35.
- Nordiawan. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*(Sutopo(ed.)). Alfabeta Bandung.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*..
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.